



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 754 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL
RAJAWALI PLACE JALAN H.R. RASUNA SAID RT 007 RW 003,
KELURAHAN SETIABUDI, KECAMATAN SETIABUDI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Hasil Rapat Koordinasi Penelitian Pertelaan Rumah Susun Komersial Rajawali Place tanggal 3 September 2024, Pertelaan Rumah Susun Komersial Rajawali Place Jalan H.R. Rasuna Said RT 007 RW 003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat oleh PT Permadani Khatulistiwa Nusantara telah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk disahkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun serta memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 September 2024 Nomor IP.02.02/1506-31.200/IX/2024 Hal Penyampaian Permohonan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Rajawali Place, pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Rajawali Place Jalan H.R. Rasuna Said RT 007 RW 003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL RAJAWALI PLACE JALAN H.R. RASUNA SAID RT 007 RW 003, KELURAHAN SETIABUDI, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Rajawali Place Jalan H.R. Rasuna Said RT 007 RW 003, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ferry Ma'ruf selaku Presiden Direktur PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.

- KEDUA : Hal-hal teknis terkait pertelaan dalam Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Rajawali Place sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2024

Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta